



## Agenda Inovasi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029: Analisis Innovation Governance dan Model Penguatannya

Ferdiansyah Wicaksono\*<sup>1</sup>, Yuyu Purwanti<sup>1</sup>, M. Rohmatullah<sup>1</sup>, Anris Susilawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana Universitas Pasundan, Kota Bandung

<sup>2</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur

✉ Surel Korespondensi: [ferdyansyah.wicaksono@unpas.ac.id](mailto:ferdyansyah.wicaksono@unpas.ac.id)

**ABSTRAK:** Inovasi daerah semakin diakui sebagai instrumen kritis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing wilayah. Namun, banyak dokumen perencanaan daerah belum secara eksplisit membangun arsitektur innovation governance yang koheren. Artikel ini bertujuan menganalisis agenda inovasi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2025–2029, dengan fokus pada identifikasi orientasi inovasi, kluster prioritas inovasi, gap innovation governance, dan pengembangan model penguatan tata kelola inovasi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen (document analysis), analisis isi (content analysis), dan pengodean tematik (thematic coding). Data primer adalah RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029, sedangkan dokumen Analisis Isu Kabupaten Cianjur digunakan sebagai triangulasi. Kerangka teoretis mengintegrasikan innovation governance, regional innovation system, collaborative governance, mission-oriented innovation, dan public sector innovation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPJMD Kabupaten Cianjur memuat orientasi inovasi yang beragam mencakup transformasi digital, agribisnis, pariwisata, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Terdapat lima kluster prioritas inovasi daerah yang teridentifikasi. Namun, terdapat gap signifikan dalam hal kelembagaan, kolaborasi lintas aktor, integrasi kebijakan, pengukuran dampak, dan pendanaan inovasi. Artikel ini mengajukan model Territorial Innovation Governance (TIG) sebagai kerangka konseptual baru untuk memperkuat tata kelola inovasi Kabupaten Cianjur. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan bagi Bupati, Bapperida, BRIDA, perangkat daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem inovasi daerah yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Innovation Governance, Regional Innovation System, RPJMD, Kebijakan Inovasi Daerah, Cianjur

**ABSTRACT:** Regional innovation is increasingly recognized as a critical instrument for accelerating development and enhancing territorial competitiveness. However, many regional planning documents have not yet explicitly constructed a coherent innovation governance architecture. This article aims to analyze the regional development innovation agenda embedded in the Medium-Term Regional Development Plan (RPJMD) of Cianjur Regency 2025–2029, focusing on identifying innovation orientations, innovation priority clusters, innovation governance gaps, and developing a model for strengthening regional innovation governance. This study employs a qualitative approach using document analysis, content analysis, and thematic coding methods. The primary data source is the RPJMD of Cianjur Regency 2025–2029, while the Cianjur Issue Analysis document serves as triangulation. The theoretical framework integrates innovation governance, regional innovation system, collaborative governance, mission-oriented innovation, and public sector innovation theories. Findings reveal that

*the RPJMD contains diverse innovation orientations encompassing digital transformation, agribusiness, tourism, public services, and bureaucratic reform. Five regional innovation priority clusters are identified. Nevertheless, significant gaps are found in institutionalization, cross-actor collaboration, policy integration, impact measurement, and innovation funding. This article proposes a Territorial Innovation Governance (TIG) model as a novel conceptual framework to strengthen Cianjur Regency's innovation governance. These findings have policy implications for the Regent, Bapperida, BRIDA, regional agencies, universities, and other stakeholders in building a sustainable regional innovation ecosystem.*

**Keywords:** *innovation governance, regional innovation system, RPJMD, regional innovation policy, Cianjur*

## 1. PENDAHULUAN

Inovasi telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di era kontemporer. Pada tingkat global, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Oslo Manual edisi keempat (2018) menegaskan bahwa inovasi tidak lagi eksklusif menjadi domain sektor privat, melainkan telah berkembang menjadi agenda sentral pemerintahan publik dan pembangunan wilayah. Laporan OECD Innovation Outlook (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan terhubung pada berbagai level tata pemerintahan mampu tumbuh lebih cepat dalam merespons grand challenges seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan transformasi digital. Mission-oriented innovation yang diadvokasi oleh Mazzucato (2018) menegaskan pentingnya negara memainkan peran proaktif dalam membangun arah inovasi berbasis tujuan publik jangka panjang.

Di Indonesia, arah kebijakan inovasi nasional semakin menguat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), yang mengamanatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga litbang, dan dunia usaha dalam membangun ekosistem inovasi nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan transformasi ekonomi berbasis inovasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan (Bappenas, 2025). Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan penguasaan teknologi dan inovasi sebagai prasyarat kemandirian bangsa, selaras dengan konsep regional innovation system yang dikembangkan oleh Cooke (1992) dan Asheim & Isaksen (2002).

Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam membangun ekosistem inovasi lokal yang responsif terhadap potensi dan tantangan spesifik wilayahnya. Namun, penelitian Edler dan Fagerberg (2017) menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi daerah sangat bergantung pada kualitas innovation governance – yakni kapasitas kelembagaan untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menginternalisasi inovasi ke dalam siklus kebijakan publik. Tanpa arsitektur tata kelola yang kuat, inovasi daerah cenderung bersifat sporadis, tidak berkelanjutan, dan terputus dari agenda pembangunan jangka menengah.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki posisi strategis dengan karakter pembangunan yang unik: kawasan agraris berbasis padi dan hortikultura, kawasan agropolitan yang berkembang di Cipanas-Pacet, kawasan pariwisata yang beragam dari pegunungan hingga pesisir selatan, serta kawasan industri pengolahan dan perdagangan. Dengan total pendapatan daerah mencapai Rp4,60 triliun pada tahun 2024 dan laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,9% pada tahun 2029 (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025), Kabupaten Cianjur memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk berinvestasi dalam inovasi daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi bingkai pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini mengusung Visi “Cianjur Berjaya (Beragama, Sejahtera, dan Berkarya)” dengan lima misi strategis yang mencakup pengembangan SDM, ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, infrastruktur berkelanjutan,

dan reformasi birokrasi. Dokumen RPJMD ini secara eksplisit memuat agenda inovasi daerah, mengintegrasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital, pembangunan kluster wisata dan pangan, serta pengembangan ekosistem riset dan inovasi.

Namun demikian, terdapat celah ilmiah (research gap) yang signifikan dalam kajian inovasi daerah di Indonesia. Pertama, sebagian besar penelitian tentang inovasi daerah berfokus pada evaluasi inovasi tunggal atau studi kompetisi inovasi, bukan pada analisis sistematis terhadap bagaimana RPJMD membangun agenda inovasi secara menyeluruh (Muluk, 2008; Yogi & Ikhsan, 2018). Kedua, literature gap juga teridentifikasi di mana kajian innovation governance berbasis analisis dokumen RPJMD di kabupaten dengan karakteristik agro-tourist region masih sangat terbatas. Ketiga, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji gap antara agenda inovasi yang dirumuskan dalam RPJMD dengan kapasitas tata kelola inovasi yang tersedia.

Berdasarkan identifikasi celah penelitian tersebut, artikel ini menawarkan novelty berupa: (1) analisis sistematis terhadap orientasi dan kluster inovasi dalam RPJMD menggunakan pendekatan thematic coding berbasis teori; (2) identifikasi gap innovation governance melalui sintesis kerangka multi-teori; dan (3) pengembangan model Territorial Innovation Governance (TIG) sebagai kontribusi konseptual baru yang disesuaikan dengan konteks daerah berbasis agro-tourist di Indonesia. Artikel ini bukan merupakan ringkasan atau deskripsi RPJMD, melainkan merupakan analisis ilmiah kritis terhadap agenda inovasi yang termuat di dalamnya.

Pertanyaan penelitian yang dijawab dalam artikel ini adalah: Bagaimana RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029 membangun agenda inovasi pembangunan daerah, serta apa peluang dan tantangan implementasinya dalam perspektif innovation governance? Tujuan penelitian meliputi: (1) mengidentifikasi orientasi kebijakan inovasi daerah dalam RPJMD; (2) menganalisis kluster prioritas inovasi daerah; (3) mengidentifikasi gap innovation governance; (4) mengembangkan model penguatan innovation governance Kabupaten Cianjur; dan (5) merumuskan implikasi kebijakan bagi berbagai pemangku kepentingan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Innovation Governance: Dari Koordinasi Menuju Orkestrasi

Innovation governance merujuk pada keseluruhan sistem kelembagaan, mekanisme koordinasi, dan kapasitas yang digunakan oleh aktor publik untuk mengarahkan, mengelola, dan mengevaluasi proses inovasi (Edler & Fagerberg, 2017; OECD, 2021). Konsep ini melampaui regulasi sederhana, mencakup bagaimana pemerintah mampu berfungsi sebagai orkestrasi inovasi multi-aktor. Borrás dan Edler (2020) membedakan antara governance of innovation (bagaimana kebijakan inovasi dirancang) dengan governance for innovation (bagaimana kapasitas kelembagaan dibangun untuk mendukung inovasi secara berkelanjutan). Dalam konteks pemerintah daerah, Kuhlmann dan Rip (2018) menekankan bahwa innovation governance yang efektif membutuhkan tiga kapasitas utama: kapasitas analitik untuk memahami sistem inovasi, kapasitas operasional untuk mengimplementasikan kebijakan, dan kapasitas koordinasi untuk mengintegrasikan berbagai aktor dan kepentingan.

### 2.2. Regional Innovation System: Ekosistem Inovasi Berbasis Wilayah

Teori Regional Innovation System (RIS) yang dikembangkan oleh Cooke (1992) dan diperluas oleh Asheim dan Isaksen (2002) memandang wilayah sebagai unit analisis utama dalam memahami dinamika inovasi. RIS terdiri dari subsistem pengetahuan (knowledge generation subsystem) yang meliputi universitas, lembaga litbang, dan lembaga pendidikan, serta subsistem aplikasi pengetahuan (knowledge application subsystem) yang mencakup industri dan UMKM. Hubungan antara kedua subsistem ini dimediasi oleh infrastruktur kelembagaan seperti regulasi, norma, dan kebijakan. OECD (2011) memperluas konsep ini dengan memasukkan dimensi territorial embeddedness, yakni sejauh mana inovasi berakar pada keunggulan komparatif dan kekhasan budaya suatu wilayah. Dalam

konteks daerah agraris seperti Cianjur, RIS memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana klaster pertanian, pariwisata, dan UMKM dapat diintegrasikan ke dalam sistem inovasi yang saling menumpang.

### **2.3. Collaborative Governance: Multi-Aktor dalam Inovasi Publik**

Collaborative governance, sebagaimana didefinisikan oleh Ansell dan Gash (2008), adalah pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif, konsensual, dan deliberatif. Emerson dan Nabatchi (2015) mengembangkan Integrative Framework for Collaborative Governance yang menekankan tiga dinamika utama: principled engagement (keterlibatan berbasis prinsip), shared motivation (motivasi bersama), dan capacity for joint action (kapasitas bertindak bersama). Dalam konteks inovasi daerah, collaborative governance menjadi kunci karena inovasi jarang lahir dari aktor tunggal. Konsep quadruple helix yang mengintegrasikan pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil (Carayannis & Campbell, 2009) menjadi model kolaborasi yang relevan untuk memperkuat ekosistem inovasi lokal.

### **2.4. Mission-Oriented Innovation dan Public Sector Innovation**

Mazzucato (2018) berargumen bahwa inovasi yang berdampak bagi masyarakat memerlukan kepemimpinan negara yang proaktif dalam mendefinisikan grand challenges dan membangun portofolio kebijakan yang koheren untuk menjawabnya. Mission-oriented innovation berbeda dari innovation policy konvensional karena ia berorientasi pada tujuan transformatif, bukan sekadar peningkatan inkremental. OECD (2021) mendukung pendekatan ini dengan menegaskan pentingnya public mission sebagai kerangka legitimasi intervensi negara dalam ekosistem inovasi. Di level pemerintah daerah, konsep ini dioperasionalkan melalui penetapan prioritas inovasi yang terhubung langsung dengan visi dan misi kepala daerah. Sementara itu, Hartley (2005) dan Mulgan (2007) mengklasifikasikan inovasi sektor publik ke dalam beberapa tipe: inovasi produk, proses, layanan, sistem, dan konsep. OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI, 2023) menambahkan dimensi mission-driven dan transformative innovation sebagai tipe tertinggi inovasi pemerintahan.

### **2.5. Policy Capacity dan Implementation Gap**

Wu et al. (2015) mendefinisikan policy capacity sebagai kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan secara efektif melalui tiga dimensi: kapasitas teknis-analitis, kapasitas manajerial-operasional, dan kapasitas politik-relasional. Howlett (2015) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan inovasi sangat bergantung pada apakah pemerintah memiliki ketiga kapasitas tersebut secara memadai. Dalam kajian implementasi kebijakan, Pressman dan Wildavsky (1984) telah menunjukkan bahwa kompleksitas rantai implementasi merupakan sumber utama kegagalan kebijakan. Dalam konteks RPJMD sebagai dokumen perencanaan, terdapat risiko implementation gap ketika agenda inovasi yang dirumuskan tidak didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang spesifik, sumber daya yang memadai, dan sistem akuntabilitas yang kuat. Kerangka teori yang dikembangkan dalam artikel ini mengintegrasikan seluruh perspektif di atas untuk membangun analytical framework yang komprehensif dalam menganalisis RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029.

## **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretivisme kritis. Sebagaimana ditekankan oleh Denzin dan Lincoln (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna, konteks, dan kompleksitas fenomena sosial secara mendalam. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat objek penelitian yang merupakan dokumen kebijakan

RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029 – yang memerlukan interpretasi kontekstual dan analisis kritis terhadap konstruksi makna di balik teks kebijakan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis kebijakan (policy analysis research) dengan tiga metode utama yang saling melengkapi. Pertama, analisis dokumen (document analysis) sebagaimana dikembangkan oleh Bowen (2009), yang melibatkan proses penemuan, seleksi, penilaian, dan sintesis data yang terkandung dalam dokumen. Dokumen kebijakan diperlakukan sebagai data primer yang merepresentasikan niat, prioritas, dan konstruksi kebijakan pemerintah daerah. Kedua, analisis isi (content analysis) yang bersifat kualitatif sesuai dengan pendekatan Krippendorff (2018), digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategorisasi agenda inovasi dalam RPJMD secara sistematis. Ketiga, pengodean tematik (thematic coding) mengikuti prosedur Braun dan Clarke (2006) dan Saldana (2021) untuk membangun tema-tema analitis berdasarkan kerangka teoretis yang telah ditetapkan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok. Data primer adalah RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025) yang mencakup seluruh bab dan lampiran. Dokumen ini dipilih karena merupakan dokumen kebijakan resmi yang mengikat dan mencerminkan agenda pembangunan daerah selama lima tahun. Data sekunder untuk triangulasi meliputi dokumen Analisis Isu Kabupaten Cianjur (2025) yang digunakan untuk memvalidasi interpretasi isu strategis, serta dokumen perencanaan pendukung seperti RPJPD Kabupaten Cianjur 2025–2045 dan kebijakan nasional yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen secara sistematis. Seluruh dokumen utama dibaca secara menyeluruh (close reading) untuk mendapatkan pemahaman holistik, diikuti dengan pembacaan terfokus (focused reading) menggunakan panduan pengodean berbasis kerangka teoretis. Unit analisis meliputi: (a) rumusan visi dan misi; (b) isu strategis dan permasalahan pembangunan; (c) arah kebijakan; (d) program prioritas daerah; dan (e) indikator kinerja yang berkaitan dengan inovasi.

Teknik analisis data mengikuti prosedur analisis tematik induktif-deduktif. Fase pertama adalah familiarisasi data melalui pembacaan menyeluruh. Fase kedua adalah pengodean awal (initial coding) menggunakan kerangka konseptual yang terdiri dari enam dimensi: orientasi inovasi, kluster inovasi, kelembagaan, kolaborasi, integrasi kebijakan, dan kapasitas. Fase ketiga adalah identifikasi tema dan sub-tema. Fase keempat adalah sintesis dan interpretasi lintas tema. Fase kelima adalah penyusunan model konseptual berdasarkan temuan. Validitas data dijamin melalui triangulasi dokumen, audit trail, dan member checking dengan akademisi bidang kebijakan publik.

Keterbatasan penelitian ini meliputi: (1) penelitian ini bersifat analisis dokumen sehingga tidak mencakup persepsi aktor pelaksana; (2) kondisi implementasi aktual RPJMD baru dapat dievaluasi setelah periode berjalan; dan (3) generalisasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian mengingat kekhasan konteks Kabupaten Cianjur. Meski demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi kontribusi konseptual dari penelitian ini terhadap pengembangan model innovation governance daerah di Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Orientasi Kebijakan Inovasi Daerah dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029

Analisis terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029 menunjukkan bahwa dokumen ini membangun orientasi inovasi yang multidimensional, meskipun belum tersistematisasi ke dalam kerangka innovation governance yang eksplisit. Visi “Cianjur Berjaya (Beragama, Sejahtera, dan Berkarya)” mengandung aspirasi transformasi yang melampaui pembangunan fisik, mengarah pada perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Dikaitkan dengan teori mission-oriented innovation (Mazzucato, 2018), visi ini dapat dibaca sebagai grand mission yang memerlukan portofolio inovasi lintas sektor untuk dapat diwujudkan.

Lima misi RPJMD secara implisit mengandung agenda inovasi yang berbeda. Misi 1 (SDM berakhlakul karimah dan berdaya saing) berorientasi pada innovation in education and health services. Misi 2 (ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif, produktif, dan berdaya saing) secara eksplisit menyebut inovasi sebagai instrumen ekonomi. Misi 3 (ketahanan pangan mandiri berbasis teknologi pertanian) berorientasi pada agricultural technology innovation. Misi 4 (infrastruktur terintegrasi dan berkelanjutan) berorientasi pada innovation in public infrastructure and services. Misi 5 (tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi) berorientasi pada governance innovation dan digital transformation. Orientasi inovasi yang beragam ini selaras dengan klasifikasi Hartley (2005) tentang tipe inovasi sektor publik yang mencakup inovasi produk, proses, layanan, dan sistem.

Dari sisi isu strategis, RPJMD mengidentifikasi transformasi digital sebagai isu lintas sektoral utama, tercermin dari indikator Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dan Indeks SPBE yang belum mencapai kategori tinggi. Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan adanya momentum inovasi yang perlu diperkuat (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025). Sementara itu, nilai SPBE masih dalam kategori “cukup”, mengindikasikan bahwa digital government governance masih memerlukan penguatan substansial. Temuan ini konsisten dengan argumen Kuhlmann dan Rip (2018) bahwa kapasitas governance seringkali tertinggal dibandingkan ambisi kebijakan inovasi yang ditetapkan.

Tabel 1. Sintesis Kerangka Teoretis Innovation Governance untuk Analisis RPJMD

Teori/Konsep	Tokoh Utama	Dimensi Analitis	Relevansi untuk Studi Ini
Innovation Governance	Edler & Fagerberg (2017); Borrás & Edler (2020); OECD (2021)	Koordinasi aktor, desain kebijakan inovasi, kapasitas kelembagaan	Kerangka utama menganalisis tata kelola inovasi dalam RPJMD
Regional Innovation System (RIS)	Cooke (1992); Asheim & Isaksen (2002); OECD (2011)	Ekosistem inovasi wilayah, aktor, interaksi, institusi	Menganalisis klaster inovasi berbasis kawasan Cianjur
Collaborative Governance	Ansell & Gash (2008); Emerson & Nabatchi (2015)	Multi-aktor, fasilitator, deliberasi, konsensus	Menganalisis pola kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam RPJMD
Mission-Oriented Innovation	Mazzucato (2018); OECD (2021)	Grand challenges, tujuan kolektif, portofolio kebijakan	Menganalisis misi pembangunan Cianjur sebagai misi inovasi
Public Sector Innovation	Mulgan (2007); Hartley (2005); OPSI OECD (2023)	Tipe inovasi layanan, proses, sistem, konsep	Menganalisis orientasi inovasi pelayanan publik dalam RPJMD
Policy Capacity & Implementation	Wu et al. (2015); Howlett (2015); Pressman & Wildavsky (1984)	Kapasitas teknis, manajerial, politik dalam implementasi	Menganalisis gap implementasi inovasi dalam RPJMD

Sumber: Sintesis penulis dari berbagai literatur, 2026

#### 4.2. Klaster Prioritas Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur

Melalui analisis tematik terhadap program prioritas, arah kebijakan, dan isu strategis dalam RPJMD, penelitian ini mengidentifikasi lima klaster prioritas inovasi daerah Kabupaten Cianjur.

Klaster-klaster ini dibentuk berdasarkan konsentrasi program, ketersediaan potensi lokal, dan orientasi inovasi yang saling berkaitan, mengacu pada pendekatan territorial innovation cluster yang dikembangkan oleh Asheim dan Isaksen (2002).

Klaster pertama adalah Inovasi Tata Kelola Digital (Digital Governance Innovation). Klaster ini mencakup agenda SPBE, transformasi digital layanan publik, pengembangan IMDI, program Wifi Gratis untuk sekolah, dan penuntasan infrastruktur TIK. RPJMD secara eksplisit menetapkan arah kebijakan untuk memperluas jaringan broadband hingga ke seluruh pelosok wilayah dan peningkatan proses bisnis pengawasan melalui IoT. Dalam kerangka OPSI OECD (2023), klaster ini merepresentasikan digital governance innovation yang berpotensi menjadi enabler bagi seluruh klaster inovasi lainnya.

Klaster kedua adalah Inovasi Agribisnis dan Ketahanan Pangan. Klaster ini merupakan klaster terbesar mengingat sektor pertanian mendominasi PDRB Cianjur dengan kontribusi signifikan. RPJMD memuat program Pembangunan Klaster Wisata dan Pangan yang secara eksplisit mengintegrasikan pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produktivitas berbasis teknologi. Produktivitas pertanian melonjak dari 5,62 ton/ha pada 2023 menjadi 6,89 ton/ha pada 2024 (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025), menunjukkan potensi inovasi teknologi pertanian yang signifikan. Dalam perspektif regional innovation system (Cooke, 1992), klaster ini memerlukan penguatan hubungan antara petani, lembaga riset pertanian, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah melalui sistem yang lebih terstruktur.

Klaster ketiga adalah Inovasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. RPJMD menetapkan program Pembangunan Klaster Wisata di 5 kawasan strategis, mengintegrasikan pariwisata alam, budaya, dan kuliner. Cianjur memiliki potensi objek dan daya tarik wisata yang sangat beragam mulai dari kawasan Cibodas, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, hingga pesisir selatan. Namun, sebagaimana teridentifikasi dalam analisis isu, pariwisata Cianjur masih bersifat event-based, belum ecosystem-based, dan belum terjadi integrasi penuh antara UMKM, budaya, dan digitalisasi. Konsep tourism innovation lab yang diusulkan beberapa peneliti (Hjalager, 2010) dapat menjadi model pengembangan yang relevan untuk konteks ini.

Klaster keempat adalah Inovasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Misi 5 RPJMD secara tegas menetapkan reformasi birokrasi sebagai agenda utama, mencakup dynamic governance, meritokrasi ASN, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari 84,85 pada 2024 menuju 89,18 pada 2030, serta penguatan Indeks Pelayanan Publik. Program Rembug Warga Wangun Desa (Waragad) merupakan inovasi participatory governance yang mengintegrasikan bottom-up planning dengan alokasi anggaran berbasis kebutuhan RT. Dalam perspektif collaborative governance (Ansell & Gash, 2008), program ini mengandung potensi sebagai platform multi-aktor yang perlu diperkuat kelembagaannya.

Klaster kelima adalah Inovasi Ekonomi Kerakyatan dan UMKM. Program Mapag Gawe (penciptaan lapangan kerja) dan program Sembako Murah Pasar Makmur mencerminkan orientasi inovasi ekonomi inklusif. RPJMD menargetkan penguatan UMKM melalui pemberdayaan, sertifikasi halal, akses pasar, dan digitalisasi. Sektor perdagangan berkontribusi 15,15% terhadap PDRB pada 2024 (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025), menunjukkan bahwa inovasi di sektor ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Pendekatan innovation ecosystem (Moore, 1993; Adner, 2017) yang melibatkan interaksi antara UMKM, platform digital, lembaga keuangan, dan pemerintah menjadi kerangka relevan untuk mengembangkan klaster ini.

#### 4.3. Analisis Gap Innovation Governance dalam RPJMD

Melalui analisis kritis terhadap RPJMD menggunakan kerangka innovation governance multi-dimensi, penelitian ini mengidentifikasi delapan gap utama yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi agenda inovasi daerah Kabupaten Cianjur. Gap-gap ini bersifat sistemik, bukan parsial,

sehingga memerlukan intervensi yang terkoordinasi. Tabel 2 menyajikan sintesis gap analysis yang teridentifikasi.

Tabel 2. Sintesis Gap Innovation Governance dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029

Dimensi Governance	Kondisi dalam RPJMD	Gap yang Teridentifikasi	Implikasi
Kepemimpinan Inovasi	Reformasi birokrasi sebagai misi 5; BRIDA sebagai aktor koordinasi	Belum ada Chief Innovation Officer; lemahnya platform koordinasi lintas OPD	Inovasi bergantung pada kepemimpinan individu, rentan discontinuity
Kelembagaan Inovasi	BRIDA dibentuk; ekosistem riset dan inovasi dikembangkan	BRIDA belum terkoneksi kuat ke perencanaan anggaran OPD	Inovasi bersifat isolated, tidak terintegrasi ke siklus APBD
Kolaborasi Multi-Aktor	Kemitraan riset dengan perguruan tinggi dan industri disebutkan	Mekanisme formal kolaborasi quadruple helix belum terdefinisi	Triple helix masih lemah; kolaborasi bersifat ad hoc
Integrasi Kebijakan	RPJMD memuat 5 misi dan 10 program prioritas	Belum ada Innovation Policy Mix yang koheren; inovasi tersebar lintas misi	Fragmentasi kebijakan; tidak ada payung koordinasi inovasi terpadu
Evidence-Based Policy	Indeks Inovasi Daerah meningkat; IMDI dan SPBE digunakan sebagai indikator	Pengukuran dampak inovasi (outcome) masih lemah; mayoritas indikator berbasis output	Sulit mengukur keberhasilan nyata inovasi; akuntabilitas rendah
Ekosistem Pendanaan Inovasi	Kolaborasi pendanaan (APBD, CSR, KPB) disebutkan	Tidak ada innovation fund atau venture public; pendanaan inovasi bergantung rutin APBD	Inovasi sulit berkembang karena keterbatasan anggaran eksperimental
Kapasitas SDM Inovasi	Meritokrasi ASN dan pengembangan kompetensi masuk RPJMD	Belum ada talent management khusus inovator; pelatihan inovasi belum sistematis	ASN kurang memiliki kapasitas inovasi; budaya inovasi masih lemah
Monitoring & Evaluasi Inovasi	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah termuat dalam RPJMD	Tidak ada Innovation Monitoring Framework khusus; M&E berbasis program, bukan dampak inovasi	Tidak ada sistem pembelajaran dari inovasi yang gagal atau berhasil

Sumber: Hasil analisis dokumen RPJMD, 2026

Gap yang paling fundamental adalah absennya mekanisme innovation policy integration yang mengaitkan seluruh agenda inovasi yang tersebar di berbagai misi dan program ke dalam satu kerangka Innovation Policy Mix (Flanagan et al., 2011). Dalam RPJMD, inovasi hadir sebagai instrumen sektoral di masing-masing misi, bukan sebagai agenda lintas misi yang dikoordinasikan secara terpadu. Hal ini menciptakan risiko fragmentasi kebijakan yang dapat mengurangi sinergi dan dampak kumulatif inovasi. OECD (2021) menegaskan bahwa efektivitas inovasi sektor publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun policy coherence di antara berbagai instrumen kebijakan yang relevan.

Gap kedua yang signifikan adalah lemahnya dimensi evidence-based policy dalam agenda inovasi RPJMD. Sebagian besar indikator kinerja yang ditetapkan bersifat output-based (jumlah program, persentase capaian) daripada outcome-based (dampak terukur terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah). Dalam perspektif mission-oriented innovation (Mazzucato, 2018), penetapan indikator yang kuat berbasis dampak merupakan prasyarat akuntabilitas publik dan pembelajaran kebijakan. Tanpa sistem pengukuran dampak yang robust, sulit untuk membedakan antara program yang berinovasi dengan yang sekadar beroperasi secara rutin.

#### 4.4. Model Territorial Innovation Governance (TIG) Kabupaten Cianjur

Berdasarkan temuan analisis orientasi inovasi, identifikasi kluster, dan gap governance, penelitian ini mengembangkan model konseptual Territorial Innovation Governance (TIG) yang disesuaikan dengan konteks Kabupaten Cianjur. Model ini merupakan kontribusi novelty artikel ini sebagai kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan teori-teori relevan ke dalam satu arsitektur tata kelola yang operasional.

Model TIG dibangun di atas tiga lapis arsitektur: Strategic Layer, Coordination Layer, dan Implementation Layer. Strategic Layer terdiri dari Komite Inovasi Daerah yang dipimpin Bupati dan mengintegrasikan BRIDA, Bapperida, dan akademisi sebagai think tank. Coordination Layer terdiri dari Innovation Portfolio Management yang mengkoordinasikan lima kluster inovasi melalui mekanisme lintas OPD. Implementation Layer terdiri dari Innovation Champions di setiap OPD yang bertanggung jawab atas implementasi agenda inovasi sektoral. Berikut adalah representasi diagram ASCII dari Model TIG:



Gambar 1. Model Territorial Innovation Governance (TIG) Kabupaten Cianjur

Sumber: Dikembangkan penulis, 2026

Model TIG memiliki empat komponen utama yang saling terhubung. Pertama, Innovation Portfolio Management yang mengelola portofolio lima kluster inovasi secara terintegrasi, mencegah fragmentasi dan duplikasi. Kedua, Quadruple Helix Collaboration Platform yang melembagakan interaksi antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat sipil melalui mekanisme formal dan permanen. Ketiga, Innovation Finance Architecture yang diversifikasi sumber pendanaan inovasi

melalui innovation fund, CSR innovation channel, dan public-private partnership. Keempat, Innovation Measurement System yang mengintegrasikan indikator input, output, outcome, dan impact ke dalam satu dashboard governance. Model ini terinspirasi dari konsep Territorial Innovation Models (Moulaert & Sekia, 2003) namun diadaptasi secara signifikan untuk konteks otonomi daerah Indonesia.

Keunggulan kompetitif Model TIG dibandingkan pendekatan konvensional terletak pada integrasinya yang menghubungkan dimensi perencanaan (RPJMD), pelaksanaan (program OPD), dan akuntabilitas (M&E dampak inovasi) dalam satu arsitektur yang koheren. Model ini juga bersifat scalable, dapat diterapkan pada klaster yang berbeda dengan intensitas yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing domain inovasi.

**4.5. Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan temuan penelitian dan Model TIG yang dikembangkan, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan. Tabel 3 menyajikan matriks rekomendasi kebijakan secara terstruktur.

Tabel 3. Matriks Rekomendasi Kebijakan Penguatan Innovation Governance Kabupaten Cianjur

Aktor	Dimensi Governance	Rekomendasi Strategis	Instrumen Kebijakan
Bupati & Wakil Bupati	Kepemimpinan Inovasi	Menetapkan agenda inovasi daerah sebagai prioritas lintas misi	Peraturan Bupati tentang Innovation Governance; pembentukan Komite Inovasi Daerah di bawah koordinasi Bupati
Bapperida	Integrasi Perencanaan-Inovasi	Membangun Innovation Planning Integration antara RPJMD-Renja-APBD	Innovation Portfolio Framework; Annual Innovation Roadmap; Innovation Budget Tagging dalam APBD
BRIDA	Ekosistem Riset & Inovasi	Memperkuat peran sebagai orkestrator inovasi daerah, bukan sekadar penelitian	Regional Innovation Lab; Innovation Acceleration Program; Inkubator Inovasi Daerah berbasis potensi lokal
Perangkat Daerah (OPD)	Kapasitas Inovasi OPD	Setiap OPD memiliki peta jalan inovasi yang terhubung ke target RPJMD	Innovation Champion per OPD; Service Design Thinking pelatihan wajib; IKU inovasi dalam Renstra OPD
Perguruan Tinggi	Kolaborasi Akademik	Membangun kemitraan strategis dalam riset, pelatihan, dan pendampingan inovasi	MoU triple helix; Living Lab bersama; pendampingan inovasi berbasis KKN-Tematik Inovasi Daerah
Swasta & UMKM	Innovation Ecosystem	Mengintegrasikan swasta sebagai co-creator dan co-funder inovasi daerah	CSR Innovation Fund; Innovation Voucher bagi UMKM; platform digital pengadaan berbasis inovasi
Masyarakat & Komunitas	Citizen-Centered Innovation	Membangun partisipasi warga dalam co-design dan co-evaluation inovasi	Innovation Challenge berbasis masalah warga; Rembug Inovasi Warga; digital participation platform

Sumber: Hasil analisis, 2026

Prioritas utama dalam jangka pendek (2025–2026) adalah pembentukan Komite Inovasi Daerah dan penyusunan Peta Jalan Innovation Governance yang mengkonsolidasikan seluruh agenda inovasi RPJMD ke dalam satu kerangka operasional. Dalam jangka menengah (2027–2028), fokus beralih pada penguatan ekosistem kolaborasi quadruple helix dan pembangunan Innovation Finance Architecture. Dalam jangka panjang (2029 ke depan), transformasi menyeluruh menuju Cianjur sebagai Regional Innovation Hub berbasis agro-tourism menjadi target ambisius yang perlu dibangun fondasi kelembagaannya sejak sekarang.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis agenda inovasi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029 menggunakan kerangka innovation governance. Hasil analisis menjawab pertanyaan penelitian bahwa RPJMD Kabupaten Cianjur membangun agenda inovasi yang multidimensional dan ambisius, namun belum tersistematisasi ke dalam arsitektur innovation governance yang koheren. Lima klaster prioritas inovasi berhasil diidentifikasi: (1) Inovasi Tata Kelola Digital, (2) Inovasi Agribisnis dan Ketahanan Pangan, (3) Inovasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (4) Inovasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan (5) Inovasi Ekonomi Kerakyatan dan UMKM. Klaster-klaster ini mencerminkan keunikan Cianjur sebagai daerah agro-tourist yang kaya potensi lokal.

Terdapat delapan gap innovation governance yang teridentifikasi dalam RPJMD, meliputi gap kepemimpinan inovasi, kelembagaan, kolaborasi multi-aktor, integrasi kebijakan, evidence-based policy, pendanaan inovasi, kapasitas SDM, serta monitoring dan evaluasi. Gap-gap ini bersifat sistemik dan saling berkaitan, sehingga memerlukan intervensi terkoordinasi melalui pendekatan portofolio inovasi.

Sebagai kontribusi ilmiah utama, artikel ini mengajukan Model Territorial Innovation Governance (TIG) yang mengintegrasikan tiga lapis arsitektur (Strategic, Coordination, dan Implementation) dengan mekanisme quadruple helix dan innovation portfolio management. Model ini merupakan kebaruan konseptual yang belum pernah dikembangkan sebelumnya dalam konteks otonomi daerah Indonesia, khususnya untuk daerah dengan karakteristik agro-tourist region.

Implikasi kebijakan penelitian ini mencakup perlunya Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk: (1) menerbitkan regulasi yang menjadikan innovation governance sebagai sistem resmi tata kelola daerah; (2) memperkuat BRIDA sebagai orkestrator ekosistem inovasi; (3) membangun platform kolaborasi quadruple helix yang formal; dan (4) mengembangkan sistem pengukuran dampak inovasi yang komprehensif. Saran untuk penelitian lanjutan mencakup: (a) studi implementasi model TIG setelah periode berjalan; (b) perbandingan comparative antara daerah agro-tourist di Indonesia dalam perspektif innovation governance; dan (c) pengembangan instrumen pengukuran innovation governance capacity index untuk pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. *Journal of Management*, 43(1), 39–58. <https://doi.org/10.1177/0149206316678451>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asheim, B., & Isaksen, A. (2002). Regional innovation systems: The integration of local 'sticky' and global 'ubiquitous' knowledge. *Journal of Technology Transfer*, 27(1), 77–86. <https://doi.org/10.1023/A:1013100704794>
- Bappenas. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kementerian PPN/Bappenas.

- Borrás, S., & Edler, J. (2020). The roles of the state in the governance of socio-technical systems' transformation. *Research Policy*, 49(5), 103971. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103971>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). Mode 3 and Quadruple Helix: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3/4), 201–234. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374>
- Cooke, P. (1992). Regional innovation systems: Competitive regulation in the new Europe. *Geoforum*, 23(3), 365–382. [https://doi.org/10.1016/0016-7185\(92\)90048-9](https://doi.org/10.1016/0016-7185(92)90048-9)
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Edler, J., & Fagerberg, J. (2017). Innovation policy: What, why, and how. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), 2–23. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grx001>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Flanagan, K., Uyarra, E., & Laranja, M. (2011). Reconceptualising the 'policy mix' for innovation. *Research Policy*, 40(5), 702–713. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.02.005>
- Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. *Public Money & Management*, 25(1), 27–34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00447.x>
- Hjalager, A. M. (2010). A review of innovation research in tourism. *Tourism Management*, 31(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.012>
- Howlett, M. (2015). Policy analytical capacity: The supply and demand for policy analysis in government. *Policy and Society*, 34(3–4), 173–182. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.002>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kuhlmann, S., & Rip, A. (2018). Next-generation innovation policy and grand challenges. *Science and Public Policy*, 45(4), 448–454. <https://doi.org/10.1093/scipol/scy011>
- Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented research & innovation in the European Union: A problem-solving approach to fuel innovation-led growth. European Commission. <https://doi.org/10.2777/360325>
- Moore, J. F. (1993). Predators and prey: A new ecology of competition. *Harvard Business Review*, 71(3), 75–86.
- Moulaert, F., & Sekia, F. (2003). Territorial innovation models: A critical survey. *Regional Studies*, 37(3), 289–302. <https://doi.org/10.1080/0034340032000065442>
- Mulgan, G. (2007). Ready or not? Taking innovation in the public sector seriously. NESTA.
- Muluk, K. (2008). *Knowledge management: Kunci sukses inovasi pemerintahan daerah*. Bayumedia Publishing.
- OECD. (2011). *Regions and innovation policy*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264097803-en>
- OECD. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation* (4th ed.). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>
- OECD. (2021). *Effective innovation policies for the digital economy*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/122782b1-en>

- OECD. (2023). *Innovation Outlook 2023: Opportunities for and resilience to major transitions*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a28e8950-en>
- OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI). (2023). *Embracing innovation in government: Global trends*. OECD.
- Pemerintah Kabupaten Cianjur. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029*. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.
- Saldana, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Tödtling, F., & Trippel, M. (2005). One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach. *Research Policy*, 34(8), 1203–1219. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.01.018>
- UNDP. (2022). *Public sector innovation: A practical guide for government*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2023). *Governing innovation for sustainable development*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1987-9>
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3–4), 165–171. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>
- Yogi, S., & Ikhsan, M. (2018). Inovasi daerah: Kajian komparatif penerapan UU No. 23 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 203–221.
- Zabala-Iturriagoitia, J. M., Jimenez-Saez, F., & Castro-Martinez, E. (2008). Evaluating European regional innovation systems: Theory and evidence. *Regional Studies*, 42(8), 1163–1178. <https://doi.org/10.1080/00343400701677736>
- Zurbruggen, C. (2011). Governance: An analysis of the literature and emerging developments. *Management and Public Administration*, 14(1), 1–25.